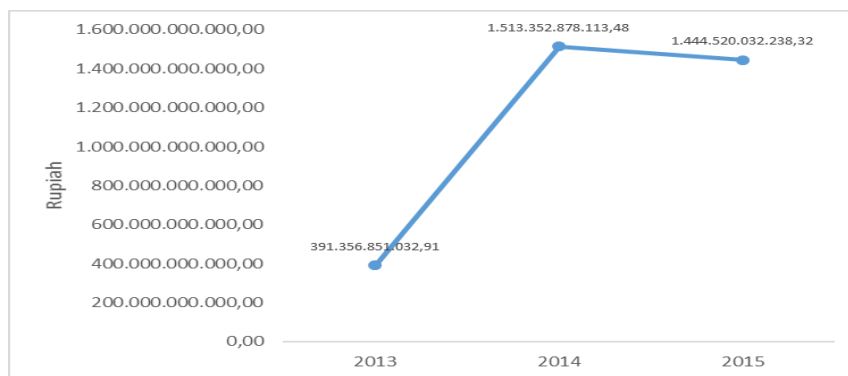


BAB V ANALISIS APBD

5.1. Pendapatan Daerah

Sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kondisi keuangan daerah Provinsi Kaltara tergolong belum stabil terutama pada tahun 2013. Sumber pendapatan daerah ditopang oleh hibah dari pemerintah Provinsi Kaltim hampir sebesar 390 milyar rupiah. Pada tahun 2014, Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara berkembang pesat, menjadi 1,5 triliun rupiah. Sumber terbesar adalah dari Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Pada tahun 2015, terjadi sedikit penurunan total pendapatan daerah menjadi 1,4 triliun rupiah. Namun, sumber pendapatan daerah semakin bervariasi. Provinsi Kaltara telah menerima pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta meningkatnya Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus.



**Grafik 5.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara
Tahun Anggaran 2013-2015**

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Perkembangan jenis-jenis sumber pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda. Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kecenderungan meningkat positif. Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 dan 2014 masih bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi baru terealisasi pada tahun 2015.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi untuk kedua sumber penerimaan yang lain, yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013, Provinsi Kaltara belum menerima pendapatan daerah dari Dana Perimbangan. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Bukan Pajak baru diterima pada tahun 2014 hingga 2015. Begitu pula dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan untuk Hibah dari Provinsi Kaltim masih diterima hingga tahun 2015, namun jumlahnya semakin menurun. Penurunan hibah Provinsi Kaltara tidak

mempengaruhi keuangan daerah, karena penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kaltara telah memiliki kemandirian Pendapatan Daerah meski belum sepenuhnya stabil.



Grafik 5.2. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Tabel 5.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	PENDAPATAN	391.356.851.032,91	1.513.352.878.113,48	1.444.520.032.238,32	141,07
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.356.851.032,91	11.833.885.267,48	370.184.985.159,32	1.900,17
1.1.1.	Pajak daerah	-	-	305.686.568.264,00	-
1.1.2.	Retribusi daerah	-	-	142.065.600,00	-
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	1.356.851.032,91	11.833.885.267,48	64.356.351.295,32	608,00
1.2.	Dana Perimbangan	-	1.228.625.712.846,00	910.439.345.079,00	-
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	-	1.199.836.456.846,00	199.244.097.079,00	-
1.2.2.	Dana alokasi umum	-	20.567.986.000,00	651.247.428.000,00	-
1.2.3.	Dana alokasi khusus	-	8.221.270.000,00	59.947.820.000,00	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	390.000.000.000,00	272.893.280.000,00	163.895.702.000,00	-34,99
1.3.1	Hibah	390.000.000.000,00	200.000.000.000,00	71.538.702.000,00	-56,47
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	-	-	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	-	72.893.280.000,00	92.331.430.000,00	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	25.570.000,00	-

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

5.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat

digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

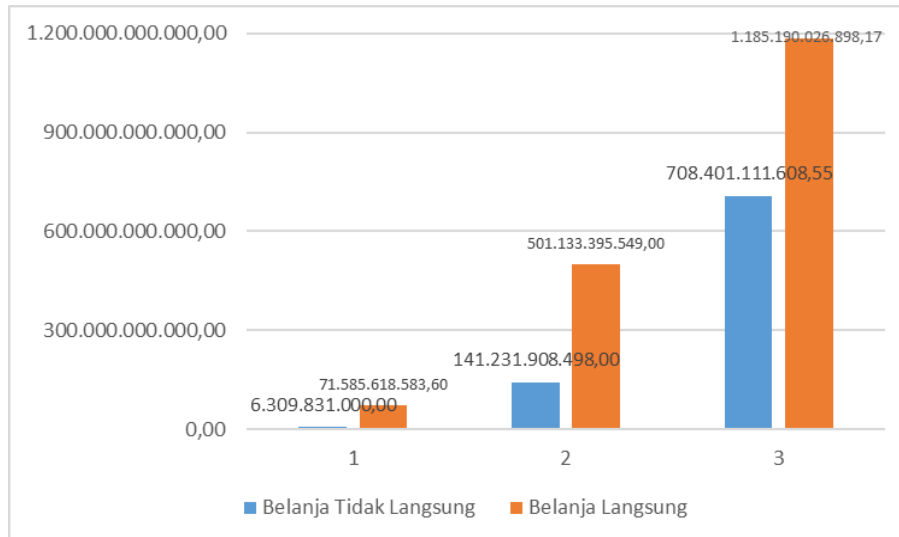
Selama periode tahun 2013 hingga 2015, realisasi belanja daerah Provinsi Kaltara memiliki kecenderungan meningkat, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pada tahun 2014, realisasi belanja langsung meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yakni dari 6,3 milyar rupiah menjadi 141 milyar rupiah. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja hibah dan kenaikan signifikan pada realisasi belanja pegawai (Tabel 5.2).

Tabel 5.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kaltara TA 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	6.309.831.000,00	141.231.908.498,00	792.020.755.313,88
1	Belanja Pegawai	6.309.831.000,00	46.206.963.498,00	109.938.425.365,00
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	-	94.624.945.000,00	248.342.542.745,81
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	83.619.643.705,33
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
8	Belanja Tidak Terduga	0,00	400.000.000,00	500.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	83.619.643.705,33
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemrintah Desa	-	-	266.010.999.792,41
B	Belanja Langsung	71.585.618.583,60	501.133.395.549,00	1.185.190.026.898,17
1	Belanja Pegawai	5.897.172.600,00	35.906.166.100,00	92.731.228.875,00
2	Belanja Barang dan Jasa	33.086.715.718,60	240.588.071.819,00	423.849.112.920,00
3	Belanja Modal	32.601.730.265,00	224.639.157.630,00	668.609.685.103,17
	Total Belanja	77.895.449.583,60	642.365.304.047,00	1.977.210.782.212,05

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Realisasi belanja daerah kembali naik hingga tiga kali lipat di tahun 2015 hingga mencapai 1,97 triliun rupiah. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipenuhi. Baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, memiliki kecenderungan meningkat, meski Belanja Langsung tetap lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga faktor kondisi perekonomian baik lokal, nasional maupun global (grafik 5.3).



Grafik 5.3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

5.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya kegunaan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltara baru dimulai tahun 2014. Sumber Pembiayaan Daerah hingga tahun 2015 hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (Tabel 5.3).

Tabel 5.3
Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Penerimaan Pembiayaan	-	313.461.401.449,21	1.182.847.668.356,69
1.1	Penggunaan SiLPA	-	331.461.401.449,21	1.182.847.668.356,69
1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
3	Pembiayaan Netto	-	313.461.401.449,21	1.182.847.668.356,69

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

5.4. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio

likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah (Tabel 5.4).

Tabel 5.4
Neraca Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1	ASET			
1.1	Aset Lancar	314.016.703.290,98	1.187.219.649.247,69	737.142.875.002,37
	Kas di Kas Daerah	313.461.401.449,31	1.182.847.668.356,69	-
	Kas di Kas Bendahara Penerimaan	-	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1.615.909.254,00	-
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	-	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-	50.000.000.000,00
	Piutang	-	-	4.361.670.672,58
	Persediaan	37.524.050,00	2.429.505.241,00	4.963.335.809,17
	Biaya dibayar Dimuka	517.777.791,67	326.566.396,00	1.510.650.894,00
1.2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	
	Investasi Non Permanen	-	-	-
	Investasi Permanen	-	-	300.000.000.000,00
1.3	Aset Tetap	33.712.047.670,00	252.951.389.101,00	555.021.582.998,30
	Tanah	-	11.465.819.500,00	82.473.448.200,00
	Peralatan dan Mesin	30.599.659.140,00	161.979.641.765,00	92.025.540.309,98
	Gedung dan Bangunan	-	4.021.496.400,00	3.726.397.807,99
	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	-	-	122.829.696.439,00
	Aset tetap Lainnya	1.721.061.530,00	2.385.523.280,00	55.870.669.816,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.391.327.000,00	73.098.908.156,00	251.629.284.066,00
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-53.533.453.640,67
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00	
1.5	Aset Lainnya	0,00	15.294.398.700,00	18.955.213.805,01
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-
	Kemitran dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	12.182.092.900,00	18.946.919.805,01
	Aset Lain-lain	-	3.112.305.800,00	8.294.000,00
	JUMLAH ASET	344.616.362.430,98	1.455.465.437.048,69	1.371.955.329.181,43
2	KEWAJIBAN			
2.1	Kewajiban jangka Pendek	0,00	14.602.095,00	
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	1.464.595,00	-
	Utang Bunga	-	-	-
	Utang Pajak	-	13.137.500,00	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	
	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-
	Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-
	Utang Pemerintah Pusat	-	-	-
	Utang Pemerintah Provinsi	-	-	-
	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	14.602.095,00	
3	EKUITAS DANA			
3.1	Ekuitas Dana Lancar	314.016.703.290,98	1.187.205.047.152,69	

No	Uraian	2013	2014	2015
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	313.461.401.449,31	1.184.448.975.515,69	-
	Cadangan Untuk Piutang	517.777.791,67	326.566.396,00	-
	Cadangan Untuk Persediaan	37.524.050,00	2.429.505.241,00	-
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-
	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-
3.2	Ekuitas Dana Investasi	33.712.047.670,00	268.245.787.801,00	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	33.712.047.670,00	252.951.389.101,00	-
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	-	15.294.398.700,00	-
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	-
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	347.728.750.960,98	1.455.450.834.953,69	-

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Berdasarkan Tabel 5.4, dapat diketahui jbaran rasio keuangan Provinsi Kaltara tahun 2013-2015 sebagai disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rasio Keuangan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Rasio Lancar (Rp)	-	81.304,75	-
Rasio Quick (Rp)	-	81.138,37	-
Rasio total hutang terhadap total aset (%)	0	0,001	-
Rasio hutang terhadap modal (%)	0	0,001	-
Rata-rata Umur Piutang (hari)	*	*	-
Rata-rata Umur Persediaan (hari)	-	-	-

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Keterangan:

- Belum ada piutang

5.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial.

Mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengaktifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan

dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai berikut :

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan (Tabel 5.6).

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	6.309.831.000,00	46.206.963.498,00	109.938.425.365,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	610.831.000,00	14.406.719.294,00	48.689.826.624,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	5.549.000.000,00	31.650.244.204,00	52.427.103.132,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00	150.000.000,00	3.090.966.100,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)			5.730.529.509,00
B	Belanja Langsung	40.321.242.998,00	358.790.220.499,00	893.218.944.783,17
1	Belanja Honorarium PNS**)	5.378.050.000,00	28.232.072.500,00	67.972.772.250,00
2	Belanja Uang Lembur**)	-	-	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	82.400.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	1.822.340.142,00	4.710.582.576,00	10.782.096.126,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	-	-	-
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	-	334.015.100,00	394.490.300,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	614.907.700,00	805.908.900,00	3.330.802.210,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	17.479.000,00	985.504.336,00	2.439.730.400,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	17.924.277.179,00	92.214.794.757,00	114.931.567.769,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	32.601.730.256,00	224.639.157.630,00	668.609.685.103,17
13	Belanja Honorarium Non PNS	519.122.600,00	7.336.255.000,00	20.820.010.625,00
	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	-	-	202.500.000,00
	Uang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga	-	337.838.600,00	3.735.290.000,00
	TOTAL	46.631.073.998,00	404.997.183.997,00	1.003.157.370.148,17

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks.

Tabel 5.7
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	Tahun anggaran 2013	46.631.073.998,00	77.895.449.583,00	59,86
2	Tahun anggaran 2014	404.997.183.997,00	642.365.304.047,00	63,05
3	Tahun anggaran 2015	1.003.157.370.148,17	1.977.210.782.212,05	50,74

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 59,86%. Angka ini naik menjadi 63,05% di tahun 2014 hingga kembali menurun mencapai 50,74% pada tahun 2015. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Tabel 5.7).

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Daerah untuk mengukur kinerja APBD sebagai berikut :

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Tabel 5.8 menginformasikan analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah yang dilakukan adalah dengan mencari nilai defisit riil anggaran terlebih dahulu dan melihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Tabel 5.8
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

NO	Uraian	2013	2014	2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	391.356.851.032, 91	1.513.352.878.113, 48	1.444.525.012.092, 50
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	77.895.449.583, 60	642.365.304.047, 00	1.893597.163.506, 72
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-
A	Defisit riil	313.461.401.449	870.987.574.066	(449.072.151.414)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69	735.376.824.101,47

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016

Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69	735.376.824.101,47

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

b. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tabel 5.10 menjelaskan analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APDB yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan.

Tabel 5.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013		2014		2015		Rata-rata Petumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	313.461.401.449		1.184.448.975.515		735.376.824.101		
2.	Pelampauan penerimaan PAD	1.356.851.032	0,43	11.833.885.267	0,99	61.983.136.016	8,42	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	35.000.000.000	11,16	250.008.160.000	21,11	48.904.098.000	6,65	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

c. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Untuk memperoleh gambaran secara riil sisa` lebih pembiayaan anggaran, dilakukan analisis terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 5.11
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Saldo kas neraca daerah	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69	735.376.824.101,47
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan			
3.	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	313.461.401.449,21	1.184.448.975.515,69	735.376.824.101,47

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016

5.6. APBD Provinsi Kaltara Per 30 Nopember 2016

1. Pendapatan

Pendapatan Perubahan APBD Provinsi Kaltara per 30 Nopember 2016 sebesar Rp.2.316.135.096.354,83 meliputi dana perimbangan sebesar Rp.1.659.437.612.000,00, PAD sebesar Rp.512.366.490.812,83 terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp.267.309.153.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.245.057.337.812,83, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.144.330.993.542,00 dan Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.185.747.821.000,00, dana

alokasi umum /DAU sebesar Rp.1.032.459.159.000,0 dan dana alokasi khusus/DAK sebesar Rp.441.230.632.000,00.

2. Belanja

Belanja Perubahan APBD Provinsi Kaltara per 30 Nopember 2016 sebesar Rp.2.901.369.569.202,12 mencakup belanja langsung sebesar Rp.1737.052.895.401,31 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.144.139.710.195,00, belanja barang dan jasa Rp.764.940.519.906,31 dan belanja modal sebesar Rp.827.972.665.300,00, serta belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp.297.924.009.461,15, belanja subsidi Rp.18.000.000.000,00, belanja hibah Rp.210.155.200.000,00, belanja bantuan sosial Rp.4.600.000.000,00, belanja bagi hasil Rp.215.103.964.339,66, belanja bantuan keuangan Rp.408.533.500.000,00 dan belanja tidak terduga Rp.10.000.000.000,00.

3. Pembiayaan

Berdasarkan selisih dari pendapatan dan belanja daerah untuk APBD perubahan Provinsi Kaltara tahun anggaran 2016 diperoleh defisit pembiayaan daerah sebesar Rp.585.234.472.847,29.

5.7. Jumlah Anggaran, Rasio dan Realisasi APBD Provinsi Kaltara 2013 s/d 2016

Realisasi APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2013 sebesar Rp.77.895.176.104,20 (33,42%) dari jumlah anggaran (pagu) sebesar Rp.233.103.606.219,00. Dari 14 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, realisasi tertinggi persentasenya adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 82,04%, sedangkan tertinggi jumlah pagu terserap adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara sebesar Rp.55.930.253.697,60 dari total pagu Rp.174.434.890.940,00 akan tetapi persentasenya kecil hanya 32,06%. Rasio anggaran tertinggi disandang Sekretariat Daerah sebesar 74,83% dan terendah Kepala Daerah dan Wakil 0,10% (Tabel 5.12).

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Disdikbupora	16.810.836.849,00	7,21	2.099.449.583,60	12,49
2	DinkesPP KB	3.628.230.000,00	1,56	1.643.666.214,00	45,30
3	Dinas Pekerjaan Umum	7.891.550.000,00	3,39	3.829.573.035,00	48,53
4	Bappedda	4.337.000.000,00	1,86	2.230.776.717,00	51,44
5	Dishubkominfo	3.547.500.500,00	1,52	1.719.621.828,00	48,47
6	Dinsosnakertrans	2.561.340.880,00	1,10	1.187.068.362,00	46,35
7	Bankespol PB	3.608.130.000,00	1,55	1.468.391.742,00	40,70
8	Kepala Daerah & Wakil	235.500.000,00	0,10	193.200.000,00	82,04
9	Sekretariat Daerah	174.434.894.940,00	74,83	55.930.253.697,60	32,06
10	Dispenda	3.144.290.000,00	1,35	1.036.031.225,00	32,95
11	Inspektorat	3.654.998.050,00	1,57	1.440.668.830,00	39,42
12	BPKPDT	2.715.010.000,00	1,16	1.736.311.500,00	63,95
13	Distanhut	3.416.325.000,00	1,47	2.655.238.167,00	77,72
14	Disperindagkop UMKM	3.118.000.000,00	1,34	724.925.221,00	23,25
	Jumlah	233.103.606.219,00	100,00	77.895.176.104,20	33,42

Sumber : Bappedda Prov. Kaltara, 2016

Realisasi APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2014 sebesar Rp.642.365.304.047,00 (31,33%) dari jumlah anggaran (pagu) sebesar Rp.2.050.026.758.025,31. Terjadi

penambahan SKPD sebanyak 9 SKPD ditahun 2014 dari 14 SKPD ditahun 2013 menjadi 23 SKPD. Realisasi tertinggi persentase keuangannya adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 88,73%, sedangkan tertinggi pagunya adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara sebesar Rp.1.320.640.296.336,96, akan tetapi persentase terserapnya keuangan masih kecil hanya 25,60% (Tabel 5.13). Daya serap anggaran turun sebesar 2,09% dari 33,42% ditahun anggaran 2013 menjadi 31,33% ditahun anggaran 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja masih rendah, berbanding terbalik dengan penambahan SKPD ditahun 2014, seyogyanya kinerja makin meningkat pula. Rasio anggaran tertinggi masih disandang Sekretariat Daerah sebesar 64,42%. Sangat disayangkan, rasio anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga hanya 2,68% termasuk Dinas Kesehatan 1,69% dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,92% saja, padahal ketiga dinas inilah yang paling dominan bersentuhan langsung dengan penduduk miskin di Kaltara.

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Disdikbupora	55.008.419.099,00	2,68	13.437.428.596,00	24,43
2	Dinkes	34.548.188.325,00	1,69	21.502.937.448,00	62,24
3	DPUTR	256.393.565.466,00	12,51	115.906.460.941,00	45,21
4	Bappeda	50.651.348.622,75	2,47	23.446.185.819,00	46,29
5	Dishubkominfo	41.454.790.818,00	2,02	19.387.760.847,00	46,77
6	BLH	13.181.034.506,90	0,64	5.707.512.132,00	43,30
7	BPMPPKBPD	8.463.309.306,90	0,41	4.452.814.277,00	52,61
8	Dinsosnakertrans	18.895.761.151,00	0,92	5.885.376.827,00	31,15
9	BPMPT	18.905.108.010,00	0,92	5.050.450.343,00	26,71
10	Bankespol	35.035.079.325,00	1,71	10.219.116.041,00	29,17
11	Satpol PP	12.092.628.206,90	0,59	5.520.968.900,00	45,66
12	BPBD	11.351.787.995,00	0,55	5.792.504.562,00	51,03
13	DPRD	2.921.500.000,00	0,14	-	-
14	Kepala Daerah & Wakil	229.920.000,00	0,01	204.000.000,00	88,73
15	Sekretariat Daerah	1.320.640.296.336,96	64,42	338.051.335.500,00	25,60
16	Sekretariat DPRD	30.748.459.979,00	1,50	8.849.729.748,00	28,78
17	Dispenda	11.941.787.500,00	0,58	4.934.366.587,00	41,32
18	Inspektorat	12.489.727.126,00	0,61	6.564.334.396,00	52,56
19	BPP	44.048.908.582,00	2,15	9.607.018.363,00	21,81
20	DistanhutKP	29.198.920.273,00	1,42	20.698.670.345,00	70,89
21	ESDM	11.253.514.100,00	0,55	2.831.176.433,00	25,16
22	DKP	12.566.666.006,90	0,61	6.078.779.293,00	48,37
23	Disperindagkop UMKM	18.006.037.289,00	0,88	8.236.376.649,00	45,74
	Jumlah	2.050.026.758.025,31	100,00	642.365.304.047,00	31,33

Sumber : Bappeda Prov. Kaltara, 2016

Realisasi APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.893.416.871.987,22 (70,14%) dari pagu sebesar Rp.2.699.422.382.512,79. Realisasi tertinggi persentase keuangannya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 82,70%, sedangkan tertinggi pagunya masih disandang Sekretariat Daerah sebesar Rp.1.200.766.234.585,64 dengan persentase terserapnya keuangan 71,64% (Tabel 5.14). Daya serap keuangan naik sebesar 38,81% dari 31,33% ditahun anggaran 2014 menjadi 70,14% ditahun anggaran 2015. Masih sangat disayangkan SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi rasio anggarannya masih rendah masing-masing 2,97%, 1,60% dan 1,00% saja.



Tabel 5.14 Jumlah Anggaran, Rasio dan Realisasi Keuangan APBD Tahun 2015 berdasarkan SKPD Provinsi Kaltara

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Disdikbupora	80.193.882.281,08	2,97	33.665.252.551,00	41,98
2	Dinkes	43.170.868.758,72	1,60	25.053.032.881,00	58,03
3	DPUTR	771.372.909.761,80	28,58	637.919.317.727,18	82,70
4	Bappppeda	45.592.518.858,72	1,69	24.514.881.152,00	53,77
5	Dishubkominfo	69.389.575.858,72	2,57	44.539.729.452,00	64,19
6	BLH	19.624.516.139,00	0,73	12.386.867.533,00	63,12
7	BPMPPKBPDP	24.670.352.179,56	0,91	17.879.699.624,00	72,47
8	Dinsosnakertrans	27.096.670.889,72	1,00	11.998.747.951,00	44,28
9	BPMPT	24.200.702.163,17	0,90	13.691.721.991,00	56,58
10	Bankespol	28.210.462.808,72	1,05	12.508.717.905,00	44,34
11	Satpol PP	46.528.952.163,17	1,72	16.777.261.195,00	36,06
12	BPBD	19.200.702.163,17	0,71	11.005.446.800,99	57,32
13	DPRD	13.346.341.860,00	0,49	10.503.489.854,00	78,70
14	Kepala Daerah & Wakil	1.669.019.485,00	0,06	644.663.000,00	38,63
15	Sekretariat Daerah	1.200.766.234.585,64	44,48	860.203.353.708,55	71,64
16	Sekretariat DPRD	74.884.340.052,18	2,77	39.836.691.427,00	53,20
17	Dispenda	57.568.750.550,65	2,13	30.440.251.598,00	52,88
18	Inspektorat	18.387.173.625,99	0,68	9.843.362.646,00	53,53
19	BPP	35.565.523.618,72	1,32	17.265.856.118,00	48,55
20	DistanhutKP	29.905.529.831,00	1,11	18.898.009.404,00	63,19
21	ESDM	19.200.702.163,17	0,71	9.223.304.176,00	48,04
22	DKP	25.614.443.163,17	0,95	20.744.944.385,00	80,99
23	Disperindagkop UMKM	23.262.209.551,72	0,86	13.872.268.908,00	59,63
	Jumlah	2.699.422.382.512,79	100,00	1.893.416.871.987,72	70,14

Sumber : Biro Ekobang Setdaprov. Kaltara, 2016

Realisasi APBD Provinsi Kaltara Per 30 Nopember 2016 sebesar Rp.1.701.694.983.005,01 (50,65%) dari pagu Rp.2.901.369.569.202,12. Terjadi penambahan SKPD sebanyak 3 SKPD dari 23 SKPD ditahun 2015 sehingga menjadi 26 SKPD ditahun 2016. Realisasi tertinggi persentase keuangannya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara 75,93%, sedangkan tertinggi rasio pagu masih disandang Sekretariat Daerah Rp.1.233.947.500.845,21 dengan daya serap keuangan 67,55% (Tabel 5.15). Disdikbudpora, Dinkes dan Dinsosnakertrans notebene bersentuhan langsung dengan penduduk miskin di Kaltara rasio anggarannya masih rendah masing-masing 2,11%, 0,93% dan 0,63%, oleh sebab itu perlu ditingkatkan minimal diatas 10%.

Tabel 5.15 Jumlah Anggaran, Rasio Pagu dan Realisasi Keuangan APBD Per 30 Nopember 2016 berdasarkan SKPD Provinsi Kaltara

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)	%
1	Disdikbupora	61.163.196.548,00	2,11	31.548.402.174,00	51,58
2	Dinkes	27.026.404.804,00	0,93	15.151.134.143,00	56,06
3	DPUTR	805.291.512.903,00	27,76	446.783.321.494,00	55,48
4	Bappppeda	44.157.187.830,00	1,52	22.293.257.100,00	50,49
5	Dishubkominfo	87.942.720.753,00	3,03	49.216.724.794,00	55,96
6	BLH	19.767.380.000,00	0,68	11.575.667.209,00	58,56
7	BPMPPKBPDP	18.273.227.372,00	0,63	11.036.938.727,00	60,40
8	Dinsosnakertrans	18.318.642.888,00	0,63	11.831.175.050,00	64,59
9	BPMPT	25.575.819.128,49	0,88	10.713.723.242,00	41,89
10	Bankespol	18.253.882.522,00	0,63	9.330.755.913,00	51,12
11	Satpol PP	23.847.680.999,00	0,82	10.962.117.787,00	45,97
12	BPBD	13.966.580.035,31	0,48	9.162.244.733,12	65,60
13	DPRD	17.395.494.710,00	0,60	12.597.515.617,00	72,42
14	Kepala Daerah & Wakil	1.375.619.485,00	0,05	1.030.497.073,00	74,91
15	Sekretariat Daerah	1.233.947.500.845,21	42,53	833.517.898.777,45	67,55
16	Sekretariat DPRD	79.898.864.055,18	2,75	48.102.320.036,00	60,20
17	Dispenda	45.984.993.136,00	1,58	24.129.539.877,00	52,47
18	Inspektorat	12.476.683.677,00	0,43	7.361.885.689,00	59,01
19	BPP	24.811.019.319,00	0,86	14.011.204.886,00	56,47
20	DistanhutKP	30.406.579.291,00	1,05	17.514.566.061,00	57,60
21	ESDM	14.295.333.628,00	0,49	6.601.898.187,00	46,18
22	DKP	25.040.180.529,93	0,86	19.013.504.293,00	75,93
23	Disperindagkop UMKM	23.369.589.656,00	0,81	13.762.995.802,00	58,89
24	Kantor Perwakilan Kaltara	22.036.372.657,00	0,76	5.812.817.527,00	26,38
25	Kantor Sekretariat Korpri	5.396.824.560,00	0,19	2.543.234.320,00	47,12
26	RSUD Tarakan	201.350.277.870,00	6,94	56.089.642.493,44	27,86
	Jumlah	2.901.369.569.202,12	100,00	1.701.694.983.005,01	58,65

Sumber : Biro Ekobang Setdaprov. Kaltara, 2016